

**POLA DAN STRATEGI JARINGAN PEREDARAN NARKOTIKA
INTERNASIONAL MELALUI WILAYAH PERAIRAN
KABUPATEN BENGKALIS**

Muhammad Brahma Restu Priadi¹, Sobri²

^{1,2}Universitas Islam Riau

Email: muhammadbrahmarestupriadi@student.uir.ac.id¹, sobri@soc.uir.ac.id²

Abstrak

Peredaran narkotika internasional melalui jalur perairan merupakan bentuk kejahatan transnasional yang memanfaatkan konektivitas maritim, kondisi geografis, jaringan sosial, dan keterbatasan pengawasan. Kabupaten Bengkalis memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Malaysia dan berada pada kawasan Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola peredaran narkotika internasional melalui wilayah perairan Kabupaten Bengkalis, strategi operasional jaringan dalam menghindari pengawasan aparat, faktor yang mendorong keterlibatan pelaku, serta implikasinya bagi penanggulangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka. Informan dipilih secara purposive dan terdiri atas dua key informan dari pihak pelaku, satu anggota Polairud, dan satu masyarakat/nelayan pesisir. Analisis dilakukan melalui pengorganisasian data, pengelompokan tematik, identifikasi pola, dan interpretasi teoritis. Kutipan wawancara disajikan menggunakan kode KI-1, KI-2, I-1, dan I-2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran berlangsung melalui jaringan lintas negara dengan pembagian peran dan distribusi bertahap. Jaringan memanfaatkan kondisi geografis dan lingkungan, waktu operasi, transportasi laut, hubungan sosial lokal, serta struktur jaringan terputus. Faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan ketergantungan narkotika turut mendorong keterlibatan individu. Penanggulangan memerlukan pengawasan maritim terpadu, penguatan intelijen dan koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat pesisir, serta intervensi sosial-ekonomi.

Kata Kunci: Peredaran Narkotika Internasional, Jalur Perairan, Jaringan Kriminal, Bengkalis, Penanggulangan Kejahatan

Abstract

International narcotics trafficking through maritime routes represents a form of transnational crime that exploits maritime connectivity, geographical conditions, social networks, and limitations in surveillance. Bengkalis Regency is strategically located near Malaysia and the Malacca Strait. This study aims to analyze the pattern of international narcotics trafficking through Bengkalis waters, the operational strategies used by networks to evade law enforcement, the factors encouraging individual involvement, and the implications for prevention. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review. Informants were selected purposively and consisted of two key informants from the offender side, one maritime police officer, and one coastal community/fisherman. Data were analyzed through organization, thematic categorization, pattern identification, and theoretical interpretation.

The findings indicate that trafficking operates through cross-border networks with differentiated roles and staged distribution. Networks exploit geographical and environmental conditions, operating times, maritime transportation, local social relations, and compartmentalized structures. Economic incentives, social environment, and drug dependence also encourage involvement. Prevention therefore requires integrated maritime surveillance, stronger intelligence and inter-agency coordination, community participation, and socioeconomic interventions.

Keywords: International Narcotics Trafficking; Maritime Routes; Criminal Networks; Bengkalis; Crime Prevention

PENDAHULUAN

Peredaran narkoba internasional merupakan persoalan kejahatan transnasional yang tidak hanya berkaitan dengan pelaku dan barang terlarang, tetapi juga dengan kemampuan jaringan memanfaatkan ruang, konektivitas transportasi, hubungan sosial, dan celah pengawasan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, jalur laut menjadi salah satu ruang yang rentan karena luasnya wilayah perairan dan beragamnya titik akses. (Haq, 2016) menunjukkan bahwa keterbatasan pengawasan terhadap wilayah laut dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan jaringan peredaran narkoba. Kajian mengenai keamanan maritim juga menempatkan Selat Malaka dan wilayah barat Indonesia sebagai salah satu koridor penting dalam ancaman peredaran narkoba melalui laut (Hartono & Bakharuddin, 2023).

Perkembangan perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara memperlihatkan bahwa jalur maritim antara Malaysia dan Indonesia tetap relevan. (UNODC, 2025) mencatat bahwa sebagian besar methamphetamine yang masuk ke Indonesia diperdagangkan melalui kapal dari wilayah Malaysia menuju Sumatra dan menggunakan beragam jenis sarana transportasi laut. Laporan tersebut juga menunjukkan penggunaan lokasi pertemuan tertentu dan metode pemindahan barang antarkapal. Temuan regional ini memperkuat pentingnya melihat peredaran narkoba bukan semata sebagai persoalan penindakan, tetapi sebagai persoalan jaringan, ruang, dan adaptasi terhadap pengawasan.

Kabupaten Bengkalis memiliki karakteristik yang relevan dengan persoalan tersebut. Kedekatannya dengan Malaysia, posisinya pada kawasan Selat Malaka, luasnya wilayah perairan, serta aktivitas masyarakat pesisir menjadikan wilayah ini memiliki konektivitas yang sekaligus dapat menciptakan peluang bagi kejahatan lintas negara. Penelitian (Silviani & Prayuda, 2023) mengenai perbatasan Indonesia–Malaysia di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa jaringan penyelundupan narkoba memanfaatkan transportasi laut, hubungan perantara, dan titik pendaratan tidak resmi. Kondisi tersebut relevan untuk

dibandingkan dengan Bengkalis karena keduanya berada dalam ruang maritim Riau yang berhadapan dengan Malaysia.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas penyelundupan narkoba melalui laut dan keamanan maritim, tetapi kajian yang menghubungkan pola distribusi, strategi adaptasi jaringan, faktor keterlibatan pelaku, perspektif aparat, dan peran masyarakat pesisir dalam satu kerangka kriminologis pada Kabupaten Bengkalis masih terbatas. Naskah ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan data lapangan dari perspektif pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat pesisir. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi dimensi geografis, struktur jaringan, proses sosial keterlibatan pelaku, dan sistem pengawasan dalam menjelaskan keberlangsungan peredaran narkoba internasional di wilayah perairan Bengkalis.

Secara teoritis, penelitian menggunakan beberapa perspektif yang saling melengkapi. Crime Pattern Theory menjelaskan bagaimana pelaku memanfaatkan ruang, jalur, dan titik aktivitas berdasarkan akses serta peluang (Brantingham & Brantingham, 1991). Rational Choice Theory membantu membaca keputusan pelaku melalui pertimbangan keuntungan, risiko, dan peluang tertangkap (Cornish & Clarke, 1986). Routine Activity Theory menjelaskan pentingnya pertemuan antara pelaku termotivasi, sasaran yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan efektif (Cohen & Felson, 1979). Sementara itu, Differential Association Theory, Social Learning Theory, dan General Strain Theory digunakan untuk memahami proses sosial dan tekanan ekonomi yang berkaitan dengan keterlibatan individu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pola peredaran narkoba internasional melalui wilayah perairan Kabupaten Bengkalis, strategi operasional jaringan dalam menghadapi pengawasan aparat, faktor yang mendorong keterlibatan pelaku, serta implikasi temuan bagi model penanggulangan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pola peredaran narkoba, strategi jaringan, faktor keterlibatan pelaku, serta respons pengawasan dari perspektif para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena sumber data dipilih berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis pada Desember 2025 sampai Mei 2026, dengan wawancara lapangan pada Mei 2026. Terdapat empat informan, yaitu dua key

informan dari pihak pelaku peredaran narkoba, satu informan dari Polairud, dan satu informan nelayan/masyarakat pesisir. Untuk menjaga konsistensi penyajian dan kerahasiaan identitas, kutipan wawancara dalam artikel ini diberi kode KI-1 (key informan 1/Tn. M), KI-2 (key informan 2/Tn. D), I-1 (informan aparat/Polairud), dan I-2 (informan nelayan/masyarakat pesisir). Kode tersebut digunakan secara konsisten dalam bagian hasil dan pembahasan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka. Observasi digunakan untuk memahami kondisi geografis, aktivitas masyarakat pesisir, dan karakteristik pengawasan wilayah perairan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pengorganisasian data, pengelompokan tematik, identifikasi pola, perbandingan antarinforman, dan interpretasi dengan perspektif kriminologi. Keabsahan interpretasi diperkuat dengan membandingkan informasi dari key informan, aparat, dan masyarakat pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model tersebut sejalan dengan kerangka berpikir hasil penelitian pada Gambar 1. Kerangka menghubungkan kondisi geografis Bengkalis dengan pola peredaran dan faktor pendorong, kemudian mengarah pada strategi operasional jaringan, perspektif aparat dan hambatan, peran masyarakat pesisir, serta model penanggulangan. Dengan demikian, kerangka berpikir tidak hanya menggambarkan urutan temuan, tetapi juga menunjukkan hubungan antara faktor penyebab, mekanisme jaringan, kapasitas pengawasan, dan tujuan pencegahan.

Berdasarkan integrasi tersebut, penanggulangan perlu bersifat multidimensional. Pertama, pengawasan perairan diperkuat melalui patroli rutin, teknologi pemantauan dan deteksi dini. Kedua, koordinasi Polairud, TNI AL, Bea Cukai, Bakamla dan unsur terkait perlu diperkuat melalui pertukaran informasi. Ketiga, intelijen perlu diarahkan pada pemetaan hubungan jaringan, bukan hanya penangkapan kurir. Keempat, masyarakat pesisir perlu diberdayakan sebagai mitra pengawasan melalui FKPM dan mekanisme pelaporan yang aman. Kelima, intervensi sosial-ekonomi perlu dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap perekrutan.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa peredaran narkoba internasional di Bengkalis terbentuk dari interaksi antara ruang, jaringan, proses sosial, keputusan pelaku, dan sistem pengawasan. Crime Pattern Theory menjelaskan pemanfaatan ruang dan jalur

(Brantingham & Brantingham, 1991); Rational Choice Theory menjelaskan pertimbangan keuntungan dan risiko (Cornish & Clarke, 1986); sedangkan Routine Activity Theory menjelaskan bagaimana peluang kejahatan berkaitan dengan keberadaan pelaku termotivasi dan kapasitas pengawasan (Cohen & Felson, 1979). Differential Association, Social Learning, dan General Strain memperluas penjelasan mengenai proses keterlibatan individu (Sutherland, 1947; Akers, 1998; Agnew, 1992). Perspektif organized crime membantu menjelaskan pembagian peran dan pembatasan informasi dalam jaringan (Winfrey & Abadinsky, 2017).

Integrasi Temuan Teoretis dan Model Penanggulangan

Masyarakat pesisir juga memiliki posisi penting sebagai sumber informasi awal. I-2 menggambarkan bahwa aktivitas mencurigakan dapat terlihat ketika masyarakat melaut pada malam hari. Posisi tersebut dapat dikembangkan sebagai pengawasan sosial, tetapi harus disertai mekanisme pelaporan yang aman dan tidak menempatkan masyarakat pada risiko. Karena itu, pelibatan masyarakat sebaiknya ditempatkan sebagai kemitraan pencegahan, bukan sebagai asumsi bahwa masyarakat pesisir merupakan bagian dari jaringan kriminal.

Meskipun demikian, aparat menghadapi hambatan. I-1 menyatakan: “Kendala yang kami alami saat melakukan patroli rutin itu tidak lain dan tidak bukan adalah faktor alam yang kadang sering berubah.” (I-1, wawancara, 18 Mei 2026). Hambatan lain berasal dari struktur jaringan: “Para pelaku ini menggunakan jaringan terputus satu sama lain sehingga kami sulit untuk mendapatkan informasi terkait penyebaran narkoba ini.” (I-1, wawancara, 18 Mei 2026). Kedua keterangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengawasan berasal dari kombinasi faktor lingkungan dan kemampuan organisasi jaringan.

Upaya tersebut menunjukkan adanya capable guardianship dalam kerangka Routine Activity Theory. (Cohen & Felson, 1979) menjelaskan bahwa kejahatan lebih mungkin terjadi ketika pelaku termotivasi, sasaran tersedia, dan pengawasan efektif tidak memadai. Dalam konteks Bengkalis, peningkatan guardianship perlu diarahkan pada kombinasi patroli, pertukaran informasi, teknologi pengawasan, dan intelijen.

Dari perspektif Polairud, pengawasan dilakukan melalui patroli rutin di perairan Bengkalis dan Selat Malaka. I-1 menyatakan: “Kami dari Polairud sendiri sering melakukan pengawasan dengan cara melakukan patroli setiap hari di perairan Kabupaten Bengkalis serta Selat Melaka...” (I-1, wawancara, 18 Mei 2026). Selain patroli, terdapat kerja sama dengan TNI AL, Bea Cukai, dan Bakamla: “Kami juga melakukan kerja sama dengan AL,

Bea Cukai, Bakamla.” (I-1, wawancara, 18 Mei 2026).

Perspektif Aparat, Hambatan Pengawasan, dan Peran Masyarakat Pesisir

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Differential Association Theory, yang melihat perilaku kriminal sebagai sesuatu yang dipelajari melalui interaksi dengan kelompok sosial tertentu (Sutherland, 1947). Social Learning Theory memperluas penjelasan bahwa perilaku dapat dipertahankan melalui penguatan dan penghargaan yang diterima dari lingkungan sosial (Akers, 1998). Adapun General Strain Theory menjelaskan bahwa tekanan, kegagalan mencapai tujuan yang bernilai, atau keterbatasan kesempatan dapat berkaitan dengan munculnya respons menyimpang (Agnew, 1992). Dalam konteks penelitian ini, faktor ekonomi tidak dapat dipisahkan dari relasi sosial dan kesempatan yang ditawarkan jaringan.

Sementara itu, lingkungan sosial tampak dalam proses perekrutan KI-2. Ia menjelaskan: “Pada suatu saat saya dimintai tolong oleh Tn. M untuk mengedarkan barang tersebut di daerah Kabupaten Bengkalis.” (KI-2, wawancara, 6 Mei 2026). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa jaringan sosial menjadi pintu masuk menuju aktivitas kriminal.

Pada KI-2, faktor ketergantungan terlihat dari pernyataan: “Awalnya saya hanya pemakai narkoba, namun dengan berjalannya waktu untuk mendapatkan barang tersebut saya tidak mempunyai uang yang cukup untuk memakai sehari-hari.” (KI-2, wawancara, 6 Mei 2026). Keterangan ini menunjukkan hubungan antara kebutuhan memperoleh narkoba, keterbatasan sumber daya, dan masuknya individu ke dalam aktivitas distribusi.

Pada aspek ekonomi, KI-1 menyatakan bahwa dirinya memperoleh tawaran dengan imbalan besar setelah dikenalkan kepada bandar: “...dijanjikan dengan upah yang sangat besar.” (KI-1, wawancara, 4 Mei 2026). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa keuntungan finansial menjadi daya tarik yang memengaruhi keputusan untuk menerima peran dalam jaringan.

Data lapangan menunjukkan tiga faktor yang saling berhubungan, yaitu ekonomi, lingkungan sosial, dan ketergantungan terhadap narkoba. Ketiganya tidak berdiri sendiri. Faktor ekonomi memberi insentif, lingkungan sosial menyediakan akses menuju jaringan, sedangkan ketergantungan dapat membuat individu semakin rentan menerima peran tertentu dalam distribusi.

Faktor yang Mendorong Keterlibatan Pelaku

Dari sudut pandang penegakan hukum, pola tersebut menciptakan tantangan ganda: wilayah pengawasan luas dan berubah mengikuti kondisi alam, sementara struktur jaringan

membatasi informasi yang tersedia dari satu pelaku. (Hartono Bakharuddin, 2023) menekankan pentingnya keamanan maritim terpadu dan kerja sama antarlembaga untuk menghadapi peredaran narkoba melalui laut.

Temuan lain yang penting adalah penggunaan cell system. Berdasarkan keterangan penelitian, hubungan antaranggota dibuat terbatas sehingga seseorang hanya mengetahui bagian jaringan yang berkaitan langsung dengan tugasnya. Struktur demikian membatasi dampak apabila salah satu anggota tertangkap. Konsep compartmentalization dalam organisasi kriminal menjelaskan pentingnya pembatasan informasi untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi (Winfrey & Abadinsky, 2017). Karena itu, pengungkapan jaringan tidak cukup berhenti pada pelaku lapangan, tetapi membutuhkan pengumpulan informasi yang mampu menghubungkan peran dan relasi antaraktor.

Strategi pemilihan waktu, ruang dan sarana dapat dianalisis melalui Rational Choice Theory. (Cornish & Clarke, 1986) menjelaskan bahwa keputusan kriminal berkaitan dengan pertimbangan manfaat, risiko, peluang dan situasi. Dalam penelitian ini, pilihan waktu dan lingkungan dapat dibaca sebagai bentuk upaya mengurangi kemungkinan terdeteksi. Dengan demikian, strategi operasional merupakan bagian dari kemampuan adaptasi jaringan terhadap kondisi pengawasan.

Keterangan masyarakat memberikan ilustrasi mengenai aktivitas malam hari di perairan. I-2 menjelaskan: "Saya sendiri cukup sering menjadi saksi pada saat melaut atau menjaring ikan. Pada saat itu saya melaut pada malam hari dan terdengar suara mesin boat yang entah dari mana asalnya menghampiri sebuah kapal nelayan." (I-2, wawancara, 6 Mei 2026). Data ini tidak membuktikan secara langsung bahwa setiap pertemuan kapal merupakan transaksi narkoba, tetapi menunjukkan adanya aktivitas laut malam hari yang menurut informan tampak mencurigakan dan relevan dengan konteks penelitian.

Jaringan yang ditemukan menunjukkan kemampuan menyesuaikan aktivitas dengan lingkungan dan pengawasan. Berdasarkan data lapangan, strategi operasional mencakup pemilihan waktu malam hingga menjelang subuh, pemanfaatan kondisi cuaca dan laut, penggunaan sarana transportasi laut, pemanfaatan hubungan dengan masyarakat pesisir tertentu, serta pembatasan informasi antaranggota melalui cell system. Pola tersebut memperlihatkan bahwa jaringan tidak hanya memanfaatkan ruang, tetapi juga menyesuaikan cara kerja untuk mengurangi risiko deteksi.

Strategi Operasional Jaringan dan Struktur Jaringan Terputus

Data masyarakat pesisir memberikan perspektif tambahan. Informan nelayan menyatakan: “Saya salah satu nelayan di laut Bengkalis, kalau kondisi wilayah di sini mayoritas masyarakat bekerja menjadi nelayan. Kalau bicara soal peredaran narkoba di sekitar laut Bengkalis ini sudah sering terjadi.” (I-2, wawancara, 6 Mei 2026). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai aktivitas narkoba terbentuk dari kedekatan mereka dengan ruang perairan. Namun, temuan ini tidak berarti seluruh masyarakat pesisir terlibat; penelitian justru menunjukkan pentingnya membedakan masyarakat sebagai lingkungan sosial dengan individu tertentu yang mungkin dimanfaatkan jaringan.

Dari perspektif Crime Pattern Theory, pemanfaatan ruang tidak berlangsung secara acak. Pelaku cenderung menggunakan nodes, paths, dan edges yang memberikan akses dan peluang tertentu (Brantingham & Brantingham, 1991). Dalam konteks Bengkalis, wilayah laut dapat dipahami sebagai ruang yang menghubungkan titik asal, jalur perpindahan, dan titik tujuan. Karena itu, kerentanan geografis perlu dibaca bersama kapasitas pengawasan, bukan hanya sebagai akibat letak geografis.

Perspektif aparat memperkuat temuan tersebut. Informan Polairud menjelaskan: “Dikarenakan daerah Kabupaten Bengkalis ini berdekatan dengan negara Malaysia maka jalur laut adalah jalur yang dipilih oleh para cukong untuk memasukkan narkoba tersebut ke daerah Kabupaten Bengkalis.” (I-1, wawancara, 18 Mei 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kedekatan geografis dipersepsikan aparat sebagai salah satu kondisi yang membuat jalur laut menarik bagi jaringan.

Kondisi geografis Bengkalis menjadi salah satu unsur yang menjelaskan mengapa wilayah perairan dapat digunakan sebagai ruang distribusi. Kedekatan dengan Malaysia, luasnya wilayah perairan, banyaknya akses keluar-masuk, serta aktivitas masyarakat pesisir menciptakan lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan. (Haq, 2016) menunjukkan bahwa luas wilayah laut dan keterbatasan pengawasan dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan dalam peredaran narkoba melalui jalur laut. (Hartono & Bakharuddin, 2023) juga menempatkan keamanan maritim dan koordinasi antarlembaga sebagai unsur penting dalam menghadapi peredaran narkoba lintas negara.

Pemanfaatan Kondisi Geografis dan Lingkungan

Temuan tersebut juga sejalan dengan (Silviani & Prayuda, 2023) yang menunjukkan penggunaan transportasi laut, perantara, dan titik pendaratan tidak resmi dalam penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Dengan demikian, karakteristik Bengkalis sebagai wilayah pesisir yang berhadapan dengan Malaysia menjadi konteks penting dalam memahami pola distribusi yang ditemukan.

Keterangan KI-1 menunjukkan dua unsur penting. Pertama, masuknya individu ke jaringan berlangsung melalui relasi sosial. Kedua, distribusi dibangun melalui pemberian tugas tertentu dan insentif ekonomi. Temuan ini memperkuat pemahaman mengenai kejahatan terorganisasi lintas negara yang ditandai oleh pembagian fungsi, koordinasi dan hubungan antarwilayah. (UNODC, 2025) menunjukkan bahwa jalur Malaysia–Indonesia tetap menjadi salah satu jalur penting perdagangan narkoba sintesis melalui sarana laut. Temuan di Bengkalis karena itu dapat ditempatkan dalam konteks jaringan yang lebih luas, meskipun data penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memetakan keseluruhan jaringan internasional.

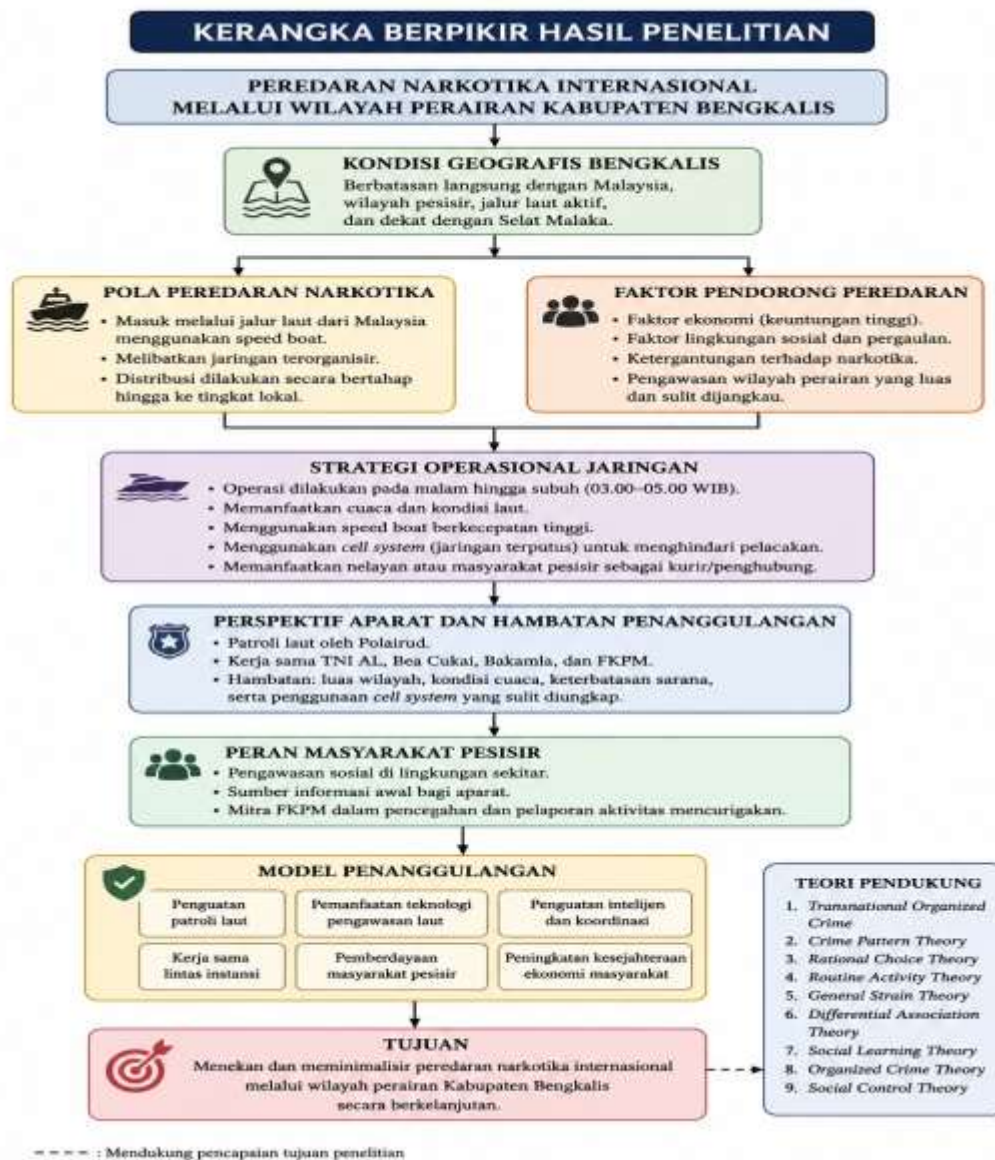
Key Informan 1 (KI-1) menjelaskan bahwa keterlibatannya bermula dari posisi sebagai pengguna, kemudian memperoleh akses kepada jaringan melalui hubungan sosial: “Awalnya saya hanya sebagai pemakai narkoba, kemudian seiring berjalannya waktu di ruang lingkup ini saya dikenalkan dengan seorang bandar besar narkoba, dari situlah saya diamanahkan ... untuk membawa narkoba tersebut, dan dijanjikan dengan upah yang sangat besar.” (KI-1, wawancara, 4 Mei 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran narkoba internasional melalui wilayah perairan Kabupaten Bengkalis memiliki karakteristik lintas negara dan berlangsung melalui pembagian peran. Berdasarkan keterangan kedua key informan, narkoba yang beredar di Bengkalis berhubungan dengan jaringan yang berada di Malaysia dan masuk melalui jalur laut sebelum diteruskan kepada aktor lain di wilayah lokal. Pola tersebut memperlihatkan bahwa distribusi tidak berlangsung sebagai tindakan individual, melainkan sebagai rangkaian aktivitas yang melibatkan aktor dengan fungsi berbeda.

Pola Peredaran Narkoba Internasional melalui Wilayah Perairan Bengkalis

Berdasarkan sintesis temuan lapangan dan hasil analisis teoritis, penelitian ini merumuskan hubungan antara kondisi geografis Bengkalis, pola dan faktor pendorong peredaran narkoba, strategi operasional jaringan, kapasitas pengawasan aparat, serta peran masyarakat pesisir dalam membentuk model penanggulangan. Sintesis hubungan tersebut

divisualisasikan dalam kerangka berpikir hasil penelitian pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Hasil Penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa peredaran narkoba internasional melalui wilayah perairan Kabupaten Bengkalis tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk dari keterkaitan antara kondisi geografis, pola peredaran, faktor pendorong, dan strategi operasional jaringan. Kondisi geografis Bengkalis yang berbatasan dengan Malaysia dan memiliki wilayah perairan yang luas menjadi konteks yang dimanfaatkan jaringan, sementara faktor ekonomi, lingkungan sosial, ketergantungan terhadap narkoba, serta keterbatasan pengawasan turut membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya peredaran. Temuan lapangan selanjutnya menunjukkan bahwa jaringan menyesuaikan waktu, kondisi laut, sarana transportasi, dan pola hubungan antaraktor untuk mengurangi risiko terdeteksi.

Pada sisi penanggulangan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan melalui patroli laut semata. Hambatan geografis dan kondisi alam, ditambah penggunaan cell system oleh jaringan, memerlukan penguatan pengawasan melalui teknologi, intelijen, dan koordinasi antarlembaga. Pada saat yang sama, masyarakat pesisir memiliki posisi strategis sebagai sumber informasi awal dan mitra pencegahan. Oleh karena itu, model penanggulangan yang dirumuskan dalam penelitian ini mengintegrasikan penguatan patroli laut, pemanfaatan teknologi pengawasan, penguatan intelijen dan koordinasi, kerja sama lintas instansi, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai pendekatan yang saling melengkapi.

KESIMPULAN

Peredaran narkoba internasional melalui wilayah perairan Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang memanfaatkan konektivitas Malaysia–Bengkalis, kondisi geografis perairan, serta jaringan sosial dan transportasi lokal. Pola distribusi berlangsung secara bertahap melalui pembagian peran antara aktor yang berbeda. Jaringan juga menunjukkan kemampuan adaptasi dengan memilih waktu operasi, memanfaatkan kondisi lingkungan, menggunakan transportasi laut, dan menerapkan struktur jaringan terputus untuk mengurangi risiko terbongkarnya keseluruhan organisasi.

Keterlibatan pelaku dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan ketergantungan narkoba. Temuan tersebut dapat dipahami melalui kombinasi Differential Association, Social Learning, dan General Strain Theory, sementara strategi ruang dan penghindaran pengawasan dapat dijelaskan melalui Crime Pattern, Rational Choice, dan Routine Activity Theory. Dari sisi penanggulangan, patroli dan kerja sama antarinstitusi telah dilakukan, tetapi masih menghadapi hambatan geografis, kondisi alam, dan adaptasi jaringan. Oleh karena itu, strategi pencegahan perlu diarahkan pada pengawasan maritim terpadu, penguatan intelijen dan koordinasi, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat pesisir, serta pemberdayaan sosial-ekonomi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. *Criminology*, 30(1), 47–88. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>
- Akers, R. L. (1998). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Northeastern University Press.
- Brantingham, P. J., & Brantingham, P. L. (1991). *Environmental Criminology*. Waveland

Press.

- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1986). *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. Springer-Verlag.
- Haq, R. S. (2016). Pendistribusian dan peredaran gelap narkoba melalui jalur laut di Kabupaten Sumenep. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.2674/novum.v3i2.16176>
- Hartono, R., & Bakharuddin. (2023). Keamanan maritim untuk memerangi peredaran gelap narkoba lintas negara melalui jalur laut di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 809–820. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3497>
- Silviani, C., & Prayuda, R. (2023). Analisis modus operandi penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi kasus Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tahun 2017–2022). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 6(1), 37–50.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology* (4th ed.). J. B. Lippincott Co.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges*. UNODC.
- Winfrey, T. L., & Abadinsky, H. (2017). *Essentials of Criminological Theory* (4th ed.). Waveland Press.